

Kepepedulian Dampak Rokok Masih Rendah

YOGYA, TRIBUN - Kepepedulian pemerintah Indonesia akan permasalahan dan dampak rokok, dianggap sejumlah pengamat masih kurang. Pemerintah dinilai masih lebih memihak pada permasalahan ekonomi dan ketenagakerjaan yang disebabkan dari pengendalian tembakau, daripada memihak faktor kesehatan yang ditimbulkan oleh tingginya konsumsi rokok di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Prof Hasbullah Thabrany, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia pada International Conference bertemakan Promoting Tobacco Control Through Policy-Relevant Research di Hyatt Regency Hotel, Selasa (21/4).

Hasbullah Thabrany mengatakan, pemerintah saat ini lebih khawatir jika penyerapan tenaga bekerja akan berkurang jika ada pengendalian produksi tembakau. Padahal, menurutnya penyerapan tenaga kerja tidak hanya dilakukan de-

ngan memproduksi tembakau menjadi rokok.

"Pemerintah selama ini masih berpikir kalau tidak ada produksi rokok, maka petani tembakau akan rugi. Padahal ada solusi lain yang bisa dilakukan. Misal seperti hasil pajak bea cukai rokok yang 10 persen untuk negara, lima persennya bisa dikembalikan langsung kepada petani tembakau untuk mengasah skill atau keterampilan lain mereka," jelasnya.

Hasbullah juga menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan faktor kesehatan yang diakibatkan oleh rokok. Karena, kesadaran masyarakat Indonesia pada golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah terhadap dampak rokok masih rendah.

Harga rokok di Indonesia pun bisa dikatakan cukup murah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang harga rokoknya cukup mahal.

"Inilah yang menyebabkan konsumsi rokok di Indonesia tinggi. Di Indonesia,

setiap tahunnya 260 miliar batang rokok dikonsumsi. Dan yang mencengangkan adalah masyarakat usia produktif. Ini juga yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah," paparnya.

Sementara itu, Prof Tjanra Yoga Adiatama dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kini sudah melakukan berbagai hal dalam upaya pengendalian tembakau.

"Seperti penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai fasilitas publik. Selain itu, upaya preventif yang sudah kami lakukan juga adalah dengan cara melakukan konseling untuk memotivasi agar masyarakat bisa berhenti merokok. Konseling ini dilakukan di puskesmas dengan nama program konseling berhenti merokok," jelasnya.

Ketua penyelenggara, Nanik Prasetyoningsih, mengatakan, acara ini bagian dari upaya akademisi dan

pengamat serta pemerhati dampak rokok, agar pemerintah memiliki upaya yang lebih konkret lagi dalam menanggulangi pengendalian konsumsi tembakau, khususnya di Indonesia.

"Selain itu, kami di sini tidak hanya membahas mengenai dampak tembakau atau rokok pada kesehatan, tapi juga membahas penelitian-penelitian yang berkenaan dengan dampak tembakau pada ekonomi sosial. Karena itulah kami mengadakan seminar internasional ini," ungkap Nanik.

Seminar internasional ini diselenggarakan Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) UMY bekerja sama dengan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH) dan The National Cancer Institute of The United States National Institute of Health (NCI/NIH). Acara ini berlangsung selama lima hari, hingga Kamis (23/4) di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta. (mrf)